



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang bertempat di Kantor Camat Kecamatan Kutambaru, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal xx, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, sebagai

xx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal xx, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, sebagai

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 03 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xx Maret 20xx di Dusun Nanasan, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, secara adat karo dengan memberi unjukan kepada kedua orang tua Pemohon II dan telah diadakannya pesta makan menurut adat karo telah sah lah pernikahan tersebut;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam setelah pernikahan secara adat pada tanggal xx Maret 20xx yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di alamat Dusun Nanasan, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dipimpin oleh xx selaku Abang Sepupu Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, No. 470-258/SK/NT/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017;
4. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. xx, laki-laki, umur 11 tahun;
 - b. xx, laki-laki, umur 7 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xx) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan pada tanggal xx Maret 20xx di Dusun Nanasan, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa, dan selanjutnya memanggil kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, di mana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor xx tanggal x Juni 20xx, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor xx tanggal x Juni 20xx, yang diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor xx tanggal xx Oktober 20xx yang dibuat oleh Kadis Kependudukan dan Capil Langkat, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Saksi I Nama xx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil, karena saksi adalah abang ipar Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung pada xx Maret 20xx di Dusun Nanasan, Desa Namu Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, secara adat karo dengan memberikan unjukan dan telah diadakan pesta makan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai agama, namun pada tanggal xx Maret 20xx Pemohon I dan Pemohon II masuk agama Islam, yang dilaksanakan di rumah Paman Pemohon II di Desa Serapit, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, yang dipimpin oleh xx sebagai abang sepupu Pemohon II, dan saksi ikut menghadiri acara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, atau sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan secara agama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan setelah masuk Islam salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah yang belum di daftarkan di

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama dan untuk mendapatkan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak ada memiliki suami kecuali Pemohon I;

Saksi II Nama xx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal xx, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung pada xx Maret 20xx di Dusun Nanasan, Desa Namu Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, secara adat karo dengan memberikan unjukan dan telah diadakan pesta makan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai agama, namun pada tanggal xx Maret 20xx Pemohon I dan Pemohon II masuk agama Islam, yang dilaksanakan di rumah Paman Pemohon II di Desa Serapit, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, yang dipimpin oleh xx sebagai abang sepupu Pemohon II, dan saksi ikut menghadiri acara tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, atau sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan secara agama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan setelah masuk Islam salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak dua orang;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah yang belum di daftarkan di Kantor Urusan Agama dan untuk mendapatkan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak ada memiliki suami kecuali Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah ini dilaksanakan secara terpadu, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I (xx) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan pada tanggal xx Maret 20xx di Dusun Nanasan, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Langkat, dan oleh karena itu perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xx, terbukti secara meyakinkan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, di mana Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon (bukti surat P.1, P.2, dan P.3) telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Hakim menilai bukti tertulis para Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil para Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Hakim berpendapat bukti tertulis para Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang orang saksi yang bernama xx dan xx;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xx dan xx mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Hakim Tunggal berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama xx dan xx menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara adat Karo pada tanggal xx Maret 20xx, di Dusun Nanasan, Desa namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum beragama dan pada tanggal xx Maret 20xx, Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama xx dan xx telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi), Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xx Maret 20xx di Dusun Nanasan, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, secara adat karo dengan memberi unjukan kepada kedua orang tua Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II hidup bersama dalam suasana rukun damai, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan secara adat karo pada tanggal xx Maret 20xx, Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Nanasan, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutambaru, oleh karenanya belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Adat Karo pada tanggal xx Maret 20xx di Dusun Nanasan, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, dan setelah pernikahan secara adat Karo tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam pada tanggal xx Maret 20xx yang dilaksanakan di di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Nanasan, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, kemudian selama ikatan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keduanya menikah dengan orang

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal ini pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara Adat Karo adalah merupakan kebiasaan dan kepercayaan masyarakat ditempat itu yang meyakini bahwa sahnya suatu pernikahan harus dilakukan menurut hukum adat, karena ketika itu Pemohon I dan Pemohon II masih menganut kepercayaan belum beragama dan baru memeluk agama Islam secara bersama-sama pada tahun xxx, oleh karena itu menurut ajaran Islam pernikahan yang demikian itu dianggap sah sesuai dengan dalil *syara'* dalam *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazaahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 233 yang berbunyi :

فان اسلما او اسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المراءة دام
النكاح بينهما

Artinya : "Kalau suami-isteri yang kafir masuk Islam atau orang murtad kembali masuk Islam sebelum habis masa iddah perempuan itu, maka kekallah pernikahan mereka itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xx Maret 20xx di Dusun Nanasan, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, telah terbukti kebenarannya, dan menurut hukum Islam pernikahan yang demikian itu dipandang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *petitum* huruf b surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 7 ayat (3) huruf "e" Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mengingat Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 11 Juli 2017, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xx) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan pada tanggal xx Maret 20xx di Dusun Nanasan, Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, tempat tinggal para Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp0,00
2. Biaya Proses	: Rp0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp0,00
4. Biaya Redaksi	: Rp0,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp0,00
Jumlah	Rp0,00 (nol rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)